

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, dilihat dari: a. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendes No 7 Tahun 2020, akan tetapi pada aspek penatausahaan dinilai masih kurang optimal, karena masih terdapat bendahara kurang mampu mengetahui dan memahami penyusunan laporan keuangan dengan baik dan benar, dan tidak jarang mempercayakan penyusunan laporan keuangan kepada orang lain yang dianggap mampu, sehingga menyebabkan terjadinya kelambatan dalam pelaporan keuangan desa
2. Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan desa dalam mengatasi pengentasan kemiskinan di Kecamatan Bokat, ditinjau dari: kebutuhan dasar, Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan. Akan tetapi pada aspek kebutuhan dasar yang diberikan pemerintah desa melalui dana desa tidak memberikan jaminan maupun strategi nyata untuk mengurangi/pengentasan kemiskinan, selain itu, pemberdayaan masyarakat juga sebagai salah satu program swakelola untuk pengentasan kemiskinan melalui dana desa hanya berfokus pada pemberian bantuan pemberdayaan

jangka pendek dan tidak mempertimbangkan program pemberdayaan jangka Panjang yang memberikan *income* dan peluang besar dalam meningkatkan ekonomi desa.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah di uraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan mutu SDM yang memiliki latar belakang ilmu Akuntansi yang mampu mengelolah laporan keuangan dengan benar sesuai dengan standar SAP
2. Program pemberdayaan masyarakat perlu digenjot sebagai salah satu strategi dala rangka untuk memberdayakan masyarakat pedesaan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arini, A. M., & Ambar. B. 2011. *Warisan Adiluhung Nusantara*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu
- Jiptono, Fandy. 2012. *Service Manajemen Menuju Layanan Prima*. Yogyakarta.
- James E. Anderson. 1979. *Public Policy Making*. New York. NJ: Holt Reinhartnwinston
- Kotler, Philip dan Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I, Edisi Kedua belas. Jakarta: PT. Indeks.
- Lexy, J Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2002, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto. Jakarta. UI Percetakan
- M. Yusuf. 2013. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah, Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rifai, Wijaya. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. ISBN 978-602-6970-61-9. Medan: Perdana Publishing
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru. Press
- Sutoro Eko, et., al., 2016. *Desa Membangun Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta.
- Taufiqurokhman, Evi. 2018. *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan*

Publik. UMJ PRESS

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Jurnal

Aras, A. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah. *Thesis. Digilib.Unhas.Ac.Id*.

Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>

Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12–32. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>

Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484>

Fahrizal, M. G. (2018). Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa kedungmaling dan desa kumitir kabupaten mojokerto berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(113), 1–7. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp6190a7971efull.pdf>

Hertati, D., & Arif, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(1), 40–49. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i1.8>

M. Ridwan Tikollah dkk. 2018. Pengelolaan dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan: Analisis*, Vol 1 Nomor 1 januari 2018

Thomas.2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *e Jurnal Pemerintahan Integratif*. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.

Peraturan

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan

Permendesa No 7 Tahun 2020 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Permendesa No 11 Tahun 2019 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Perbup Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa